

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TERHADAP  
SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA  
KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**Fitrotul Fikroh**

**NIM. C92215158**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2019**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TERHADAP SIMPANAN  
HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING  
JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Hukum Ekonomi Syariah**

**OLEH**

**Fitrotul Fikroh  
NIM. C92215158**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Fitrotul Fikroh

NIM : C92215158

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000  
Terhadap Simpanan Haji Mabruk di KSPPS BMT  
Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Babat  
Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Fitrotul Fikroh

NIM. C92215158

#### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Fikroh NIM. C92215158 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2019

Pembimbing



Saoki, M.HI.

NIP. 197404042007101004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Fikroh NIM. C92215158 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Saoki, MHI.

NIP. 197404042007101004

Penguji II

Dr. Muryahid, SH, M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji III

Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Sri Wigati, M.El.

NIP. 197302212009122001

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap Simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.” Merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan? Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap Simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi. Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni untuk mengetahui gambaran tentang praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Metode pola deduktif, yaitu dalam hal ini Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu menggabungkan akad *wadī'ah* dengan *rāhn* dalam satu transaksi dan tidak dijelaskan pada saat akad simpanan haji mabrur terjadi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: Praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Pada saat akad simpanan haji mabrur hanya dijelaskan bahwa, nasabah harus memiliki simpanan sebesar Rp. 25.000.000,- agar mendapatkan porsi haji. Nasabah tidak boleh mengambil uang simpanan haji mabrur kecuali untuk daftar haji bukan untuk kepentingan lain. Sekalipun kepentingan tersebut sangat mendesak dan menyangkut nyawa seseorang. Jadi, nasabah harus mencari dana lain bukan dengan mengambil uang simpanan haji tersebut; kedua, praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000, pada praktiknya terdapat dua akad dalam satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji mabrur dan pembiayaan haji. Sedangkan, pada awalnya simpanan haji mabrur bersifat simpanan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak KSPPS harus menjelaskan segala ketentuan pada saat akad terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari antara pihak nasabah dan pihak KSPPS tersebut. Nasabah harus lebih selektif dalam melaksanakan transaksi apapun agar tidak terjadi hal-hal yang serupa.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II <i>WADĪ'AH</i> DAN FATWA DSN-MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TENTANG TABUNGAN.....	21
A. <i>Wadī'ah</i> dalam Hukum Islam .....	21
1. Pengertian <i>wadī'ah</i> .....	21
2. Dasar hukum <i>wadī'ah</i> .....	24
3. Rukun dan syarat <i>wadī'ah</i> .....	26
4. Sifat akad <i>wadī'ah</i> .....	27
5. Jenis-jenis <i>wadī'ah</i> .....	29







# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal karena mengatur segala aspek kehidupan manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material atau spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lainnya.<sup>1</sup> Pada posisi pertama, aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam bermaksud untuk mencapai keadilan mutlak, yang diwujudkan dengan kemaslahatan seluruh umat manusia yang ada di dunia dan di akhirat. Pada posisi kedua, Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan yang muncul di masyarakat. Maka dari itu untuk mengantisipasi perubahan sosial yang senantiasa ada di masyarakat, kendati nas-nas kitab suci dan hadis Nabi SAW terbatas.<sup>2</sup>

Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan benda saja, tetapi mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Hubungan manusia dengan Tuhannya diatur di dalam hukum-hukum mengenai ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya dan alam yang ada di sekitarnya di dalam tatanan hukum mu'amalah.<sup>3</sup>

Seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji juga tak lepas dari sebuah hubungan, yang mana hubungan tersebut terjadi antara kedua belah

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13.

<sup>3</sup> Ibid., 14.

pihak atau lebih. Ibadah haji merupakan rukun iman yang ke lima di dalam Islam.

Pada masa sekarang terdapat banyak cara yang bisa dilakukan agar tetap bisa melaksanakan ibadah haji diantaranya, yaitu dengan cara menyimpan dana. Sehingga orang yang memiliki gaji yang tidak banyak bisa tetap pergi berangkat haji dengan cara tersebut. Di mana menyimpan dana merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan agar dapat menunaikan ibadah haji.

Apabila terjadi suatu permasalahan di dalam suatu perikatan juga tidak bisa dihindari. Karena kita tidak tahu apakah rizki selalu lancar atau tidak hanya Allah Swt yang mengetahuinya. Sehingga sebelum melakukan suatu perikatan terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengantisipasi kerugian tersebut.

Dalam realitanya penerapan simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan tidak sejalan dengan prinsip syariah yang telah ada. Dalam perjanjian disebutkan bahwa simpanan haji mabrur harus mencapai sebesar Rp. 25.000.000,- akan tetapi tidak dijelaskan saat akad, bahwa ketika simpanan sebesar Rp. 6.200.000,- nasabah melanjutkan dengan pembiayaan haji yang menggunakan akad *rāhn*. Sehingga membuat nasabah keberatan karena pada awal akad tidak dijelaskan adanya dua akad dalam satu transaksi, yaitu simpanan haji yang menggunakan akad *wadi'ah yad ḍamanah* dan pembiayaan haji yang menggunakan akad *rāhn*.



Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang prinsip syariah adalah: “prinsip hukum Islam dalam kegiatan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”<sup>8</sup>

Dengan demikian pentingnya penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek hukum terhadap pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 dalam menempatkan dan memberikan keadilan bagi nasabah akibat tidak mau terbebani dengan simpanan haji berubah menjadi pembiayaan haji. Karena

<sup>8</sup> Ibid., 52.



1. Praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.
2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa yang akan dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan?

Agar penelitian ini terjaga keabsahannya dan keorisinilannya, maka

Berkenaan dengan masalah tersebut penulis mencoba mengkaji beberapa karya ilmiah yang sudah ada terdahulu. Kajian pustaka ini digunakan penulis untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian sebelumnya. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Mirfaqotul Asdiqo' dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Batang.” Skripsi ini menjelaskan tentang anggota yang mendapatkan bonus satu kg gula pasir setiap Rp. 100.000 dari uang tabungan anggota. Gula pasir tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan sehingga menghasilkan keuntungan. Sistem untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan, 50 tahun) ini adanya jasa yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam. Jika peminjam meminjam lebih dari satu bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sedangkan dalam Islam melarang adanya tambahan dalam suatu transaksi karena dikategorikan sebagai riba. Ditinjau dari praktiknya, tabungan lebaran di pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba *afan muda'afah*, karena adanya pelipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.<sup>10</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang simpanan. Di sisi lain, juga terdapat perbedaan skripsi dengan penelitian ini. Di mana skripsi ini tentang tabungan lebaran yang mengandung unsure riba. Sedangkan penelitian ini tentang dua akad dalam

<sup>10</sup> Mirfaqotul Asdiqo', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Batang (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), i.

satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji dan pembiayaan haji.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Yushinta Mutiaranigtyas dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.” Skripsi ini membahas tentang nasabah peserta tabungan arisan yang menang arisan tidak perlu membayar kembali di bulan selanjutnya dengan kata lain nasabah tersebut telah putus arisan, sehingga saat pengundian tabungan menimbulkan ketidakpastian jangka waktu berlangsungnya akad yang sebenarnya. Selain itu pada akad tabungan tersebut terdapat bonus yang diberikan oleh bank berupa uang tunai, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan DSN-MUI yang mengatur tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Karena adanya ketidakpastian atau *garar* dalam hal penyerahan dana dan jangka waktu berlangsungnya akad.<sup>11</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang simpanan. Di mana skripsi ini membahas tentang ketidakpastian atau *garar* dalam hal penyerahan dan jangka waktu berlangsungnya akad. Sedangkan penelitian penelitian ini tentang dua akad dalam satu transaksi yang tidak dijelaskan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji dan pembiayaan haji.

Dalam penelitian di atas memang terdapat kesamaan penelitian, yaitu membahas tentang simpanan. Namun setelah meneliti kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini memiliki objek dengan sudut bahasan yang berbeda dari

<sup>11</sup> Yushinta Mutiaranigtyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.” (Skripsi – UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2016), ii.

Sesuai dari rumuasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.
2. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat baik bagi secara teortis maupun secara praktis, diantaranya sebagaimana berikut:

## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Islam.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai solusi terhadap problematika yang muncul akibat gejala sosial yang terjadi di masyarakat saat ini.

Pada saat akad simpanan haji mabrur nasabah berhak untuk mengetahui apabila simpanan haji mabrur dapat berubah menjadi pembiayaan haji. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat merubah pandangan masyarakat dan semoga dapat dijadikan sebagai pertimbangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan terhadap adanya dua akad dalam satu transaksi yang tidak disebutkan pada saat akad terjadi, yakni simpanan haji dan pembiayaan haji.

## G. Definisi Operasional

Sebelum memulai menyusun skripsi ini perlu penulis sampaikan bahwa judul skripsi adalah “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 Terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.” Untuk

menghindari kesalahpahaman pengertian, maka penulis kemukakan pengertian serta sekaligus penegasan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000; adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang simpanan berdasarkan akad *wadī'ah*.
2. Simpanan haji mabrur; adalah sebuah simpanan haji yang diselenggarakan oleh pihak BMT dan simpanan tersebut tidak dapat diambil kecuali untuk pendaftaran haji dan adanya penggabungan akad *wadī'ah* dengan *rāhn* apabila tabungan mencapai Rp. 6.200.000,- dan hal tersebut tidak dijelaskan pada saat akad terjadi.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicari cara penyelesaiannya.<sup>12</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ### 1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber informasi yaitu data nasabah dan wawancara.

<sup>12</sup> Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

- b. Data sekunder adalah data pendukung informasi primer yang telah diperoleh dari penelitian terdahulu, buku.

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang juga keadaan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.<sup>13</sup> Sumber data sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan pertimbangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan dalam menggabungkan akad *wadī'ah* dengan *rāhn* dalam satu transaksi. Selain itu juga data terkait pandangan nasabah yang mengalami kejadian tersebut.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.<sup>15</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>16</sup> Data sekunder

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1998), 8.

<sup>14</sup> Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2005), 55.

<sup>15</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Ui-Press, Cet.III, 2008), 101.

<sup>16</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.



Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan Manager KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan dalam menggabungkan akad *wadi'ah* dengan *rāhn* dalam satu transaksi. Dan nasabah simpanan haji mabrur yang terkait.

### b. Observasi

Dalam studi ini penulis mengamati, mencatat fenomena tentang praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkong Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

### c. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku yang dianggap relevan dengan simpanan haji dan dokumen yang berkaitan dengan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya setelah data sudah dikumpulkan, maka akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.



Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan merupakan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

[illegible]

- ## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan agar kepenulisan penelitian ini terarah dan memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. sistematika pembahasan penelitian ini ada lima bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. Hal ini merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun pembahasan lima bab ini sebagai berikut:

[illegible]

Bab kedua: *wadī'ah* dan Fatwa DSN MUI nomor iv tahun 2000 ; menyajikan pandangan secara garis besar tentang konsep *wadī'ah* menurut hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 sebagai patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul, yaitu pengertian *wadī'ah*, dasar hukum *wadī'ah*, rukun dan syarat *wadī'ah*, sifat akad *wadī'ah*, jenis-jenis *wadī'ah*, dan aplikasi *wadī'ah* dalam perbankan syari'ah. Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000.

Bab ketiga: praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan; menyajikan data hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi mengenai gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.

Bab keempat: analisis Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan; pemaparan analisis praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Dan analisis Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 terhadap simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan.



## 1. Pengertian *Wadi'ah*

Barang titipan menurut bahasa adalah sesuatu yang ditempatkan tidak pada pemiliknya agar dijaga, berarti *wadī'ah* adalah memberikan. Makna kedua *wadī'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang yang berkata *aw da'tuhu* artinya aku menerima harta tersebut darinya *qabiltu minhu dzalika al-māl liyakuna wadī'ah indi*. Makna *wadī'ah* memiliki arti, yakni memberikan harta agar dijaga oleh si penerima.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Ibid., 205.

mujarad itu sah serta dapat dipindahkan kepada pihak yang menerima titipan.<sup>21</sup>

Menurut Wahbah Zuhailly, kata *wadfi'ah* berasal dari *wada'a* yang memiliki arti meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara. Secara etimologi memiliki arti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercaya untuk menjaganya. Kemudian secara terminology, ada dua definisi yang digunakan oleh ahli fiqh:

- 1). Ulama' madzab Hanafi mendefinisikan dengan “mengikut sertakan orang lain di dalam memelihara harta, baik dengan ucapan jelas, melalui isyarat.”
- 2). Ulama' madzab Maliki, Syafi'I dan Hanbali mendefinisikan wadi'ah dengan “mewakikan orang lain untuk diberi kepercayaan memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”<sup>22</sup>

*Wadi'ah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* sebab ia meninggalkannya pad orang yang ditunjuk untuk menerima benda titipan<sup>23</sup>

*Wadi'ah* adalah amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia memiliki kewajiban untuk mengembalikannya pada saat pemilik meminta bendanya.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Ibid., 205.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Beirut: Dar al-fikr, 1984 ), 556.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ( Bairut: Damaskus, 1760 ), 273.

<sup>24</sup> Ibid., 273.

Dalam Pasal 1694 BW adalah apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya serta mengembalikannya dalam wujud asalnya.<sup>25</sup>

Pasal 1707 BW adalah Ketentuan mengenai Pasal yang harus dilakukan lebih keras:

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
2. Jika ia telah menerima diperjanjikkannya suatu upah untuk menyimpan itu;
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyaknya untuk kepentingan si penerima titipan;
4. Jika telah diperjanjikan si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.<sup>26</sup>

Kemudian dalam Pasal 1714 BW adalah si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu seperti yang telah diterimanya. Dengan demikian jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, seperti yang dititipan, baik mata uang itu telah naik atau turun harganya.<sup>27</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa, definisi *wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja apabila si penitip

<sup>25</sup> *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP, KUHPA* (Wacana Intelektual, 2015), 380.

<sup>26</sup> Ibid., 381.

<sup>27</sup> Ibid., 182.

menghendaki atau akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.

## 2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

### A. Al-quran

Dalam suatu perikatan tidak diperbolehkan merugikan orang lain yakni dengan cara mengambil keuntungan melalui cara yang bathil.

Sebagiamnan firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ قُلَىٰ ....

Artinya: “ Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu.....”<sup>28</sup>

Akan tetapi, kepercayaan dalam suatu perikatan juga harus ada sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ <sup>قلى</sup>

Artinya: "... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..”<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi* ( Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 53.

<sup>29</sup> Ibid., 48.







Sedangkan menurut jumhur ulama', pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *wadī'ah* disyaratkan baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *wadī'ah* merupakan suatu akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak yang masih kecil tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan atau orang yang menerima titipan.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* ( Surabaya: Imtiyaz, 2017), 139.

dikuasai oleh orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.<sup>37</sup>

bersama-sama dengan hartanya, kemudian dicuri, sedangkan hartanya sendiri tidak dicuri, maka ia wajib menjaminnya.”

Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a., ketika barang titipannya yang ada pada anas dinyatakan telah hilang, sedangkan harta Anas sendiri tidak.

Orang yang meninggal dunia dan telah terbukti ada barang titipan orang lain dan barang tersebut tidak ditemukan, maka ini merupakan hutang yang wajib dibayar oleh ahli warisnya. Dan jika terdapat surat dengan menggunakan tulisannya sendiri, yang berisi tentang pengakuan adanya suatu barang titipan, maka surat ini yang dijadikan pegangan. Karena tulisan sama persis dengan pengakuan, manakala ia dengan menggunakan tangannya sendiri.<sup>39</sup>

## 5. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

- a. *Wadi'ah yad amanah*, yakni suatu akad penitipan barang atau uang di mana pihak yang dititipi tidak dapat menggunakan barang atau uang tersebut.<sup>40</sup> Akan tetapi, orang yang dititipi barang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan dari pihak yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan tersebut (karena faktor-faktor yang terjadi di luar kemampuannya).

<sup>39</sup> Ibid., 274.

<sup>40</sup> Muhammad Firdaus dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* ( Yogyakarta: Renainsan, 2005), 36.



b. *Wadī'ah yad dāmanah* (*Guarantee Depository*)

Dalam pengaplikasiannya barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan (bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (nasabah). Akad ini sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving account*). Pemberian bonus seperti yang ada di giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi sebagai pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank kepada nasabah. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya akad ini ditekankan pada titipan.<sup>43</sup>

Pada umumnya, dana titipan berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dananya agar mendapat keamanan serta memperoleh kekeluasan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Adanya pembahasan mengenai produk-produk perbankan syariah yang termasuk dalam penghimpunan dana (*funding*) menggunakan akad *wadfi'ah*, yakni giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah

<sup>42</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Banker Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2002), 228-229.

<sup>43</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 149.

Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dapat dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadfi'ah* dan *mudarabah*.<sup>44</sup>

c. Giro *wadī'ah*

Kaitannya dengan produk giro, bank syariah memberikan hak secara penuh kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi tidak berkewajiban memberikan bagi hasil

<sup>44</sup> Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam...* 140.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ketentuan umum giro diantaranya sebagai berikut:

1. Dana *wadī'ah* boleh digunakan oleh pihak bank untuk kegiatan komersial dengan ketentuan harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadī'ah* tersebut;
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi tanggungan pihak bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dari penyaluran dana dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan dapat memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk dapat menarik dana masyarakat akan tetapi tidak boleh diperjanjikan diawal;
3. Pemilik dana *wadī'ah* dapat menarik dana sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana *wadfi'ah*. Pemberian bonus merupakan suatu kewenangan pihak bank dan tidak boleh diperjanjikan diawal.

Di dalam memperhitungan bonus yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

1. Tarif bonus *wadī'ah* yang diberikan sesuai dengan ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah yang ada dalam satu bulan

[illegible]

- d. Tabungan *wadī'ah*

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip *wadfi'ah* dan *mudarabah*.

[illegible]







### BAB III

**PRAKTIK SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI  
SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT  
LAMONGAN**

## Timur Cabang Babat Lamongan

BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur merupakan kantor pusat dari BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan. Untuk mengetahui sejarah berdirinya dari BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan kita harus melihat dan mengerti tentang sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur yang terletak di Jl. Raya Pasar Kliwon Karangangkring – Dukun- Gresik.

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 dan merupakan suatu lembaga keuangan syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu di bidang *Baitul māl* dan *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan suatu lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi serta merupakan progam binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan modal awal sebesar Rp. 125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal sebesar Rp. 22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang memiliki 38 orang anggota pada saat awal berdiri. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten

Dengan melihat fenomena tersebut BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Jawa Timur mendirikan Lembaga Keuangan yang terletak di Jl. Raya Pasar Babat-Babat-Lamongan dengan harapan mempermudah pedagang pasar dalam mendapatkan tambahan modal sekaligus dapat membiayai mikro setempat. Kehadiran BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan ini mendapatkan respon yang positif dari pasar dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat tidak merasa khawatir lagi dan merasa tenang akan keberadaan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan karena pedagang pasar dan masyarakat sekitar tidak terjerat dengan hutang dari renternir dan terhindar dari praktik riba.

<sup>50</sup> Imam Baihaqi, *Wawancara*, Babat Lamongan, 3 Januari 2019.





terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

3. Nilai-nilai BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan adalah mudah, aman, dan terhindar dari riba.

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur ingin mengembangkan visi dan misi keseluruh wilayah yang ada di Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro dengan membuka cabang di wilayah Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Di antara kantor cabang yang telah didirikan, yaitu:

No.	Kantor	Alamat
1.	Pusat	Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkring-Dukun-Gresik
2	Cabang Dukun	Jl. Raya Pasar Dukun No. 40 Sembungan Kidul-Dukun-Gresik
3	Cabang Campungrejo	Jl. Raya Pasar Campungrejo No. 23 Panceng-Gresik
4	Cabang Balongpanggang	Jl. Raya Sambiroto-Balongpanggang- Gresik
5	Cabang Sekapuk	Jl. Raya Sekapuk-Ujungpangkah-Gresik
6	Cabang Sungelebak	Jl. Raya Sungelebak (Depan Pasar Sungelebak) Karanggeneng-Lamongan
7	Cabang Tunjungmekar	Jl. Raya Tanjungmekar Lembung (Depan Pasar Lembung)-Kali tengah- Lamongan
8	Cabang Duduksampeyan	Jl. Raya Duduksampeyan (Depan Pasar Duduksampeyan) -Duduksampeyan- Gresik
9	Cabang Moropelang	Jl. Raya Moropelang-Babat-Lamongan

10	Cabang Sembayat	Jl. Raya K.A. Sidiq 23 Ds. Sembayat-Manyar-Gresik
11	Cabang Pasar Sidoharjo	Jl. Raya Pasar Sidoharjo Blok IV A No. 13-14 - Lamongan
12	Cabang Benjeng	Jl. Raya Benjeng No. 22 Timur Polsek Dsn. Rayung Ds. Bulurejo-Benjeng-Gresik
13	Cabang Pasar Kranji	Jl. Raya Deadles Stand Pasar Kranji-Paciran-Lamongan
14	Cabang Sumberwudi	Jl. Raya Pertigaan Sumberwudi-Karanggeneng-Lamongan
15	Cabang Kedungpring	Jl. Raya Pasar Kedungpring (Sebelah Utara Indomart)- Lamongan
16	Cabang Babat	Jl. Raya Pasar Babat-Babat - Lamongan
17	Cabang Kerek	Jl. Raya Desa Margomulyo-Kerek-Tuban
18	Cabang Montong	Jl. Montongsekar – Montong - Tuban
19	Cabang Merakurak	Jl. Raya Pasar Merakurak (Timur Pasar) Ds. Sambonggede- Merakurak –Tuban
20	Cabang Pangean	Jl. Raya Pasar Pangean-Maduran-Lamongan
21	Cabang Banjarwati	Jl. Pertigaan Banjarwati – Paciran-Lamongan
22	Cabang Sukodadi	Jl. Panglima Sudirman 02/03 (Pasar Sukodadi) Lamongan
23	Cabang Blimbing	Jl. Raya Deandles – Paciran - Lamongan
24	Cabang Sugio	Jl. Raya Pasar Sugio – Sugio - Lamongan
25	Cabang Sumberrejo	Jl. Raya Sumberrejo – Sumberrejo-Bojonegoro

Tabel 1 Kantor Cabang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur





cara melakukan pembiayaan haji. Di mana KSPPS memberikan waktu satu tahun untuk melunasi dana talangan haji tersebut.<sup>57</sup>

Apabila dalam waktu satu tahun nasabah belum bisa melunasi dana talangan haji tersebut maka dapat diperpanjang selama 5 tahun dengan membayar *ujroh* Rp. 3.000.000 per tahun.<sup>58</sup>

Di lapangan penulis melakukan wawancara dengan nasabah tentang simpanan haji mabrur dan pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Babat Lamongan yang meliputi:

Pertama, Anis mengungkapkan bahwa awal mula ia menjadi nasabah simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) kemudian setelah 2 tahun menjadi nasabah pihak KSPPS menawarkan sebuah produk yang dinamakan simpanan haji mabrur. Pada awal akad dijelaskan bahwa nasabah harus melakukan simpanan sampai Rp. 25.000.000,- untuk mendapatkan porsi haji. Akan tetapi, pada saat simpanan mencapai Rp. 6.200.000,- nasabah mendapatkan informasi bahwa ia dapat melakukan pembiayaan haji menggunakan simpanannya tersebut.

Sehingga di sinilah nasabah merasa dirugikan. Karena tidak ingin merasa terbebani dengan target pembiayaan haji yang harus lunas dalam waktu satu tahun. Apabila tidak dapat melunasinya maka, nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000 kepada pihak KSPPS.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Imam Baihaqi, *Wawancara*, Lamongan, 3 Januari 2019.

<sup>58</sup> Eka, *Wawancara*, Lamongan, 3 Januari 2019

<sup>59</sup> Anis, *Wawancara*, Lamongan, 4 Januari 2019.

Kedua, Bagus mengungkapkan bahwa apabila dalam kurun waktu satu tahun nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan haji maka, nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak KSPPS.<sup>60</sup>

Ketiga, Partini mengungkapkan bahwa nasabah harus melunasi talangan haji dalam waktu satu tahun dan apabila tidak lunas dalam waktu satu tahun maka pihak KSPPS berhak meminta *ujroh* sebesar Rp. 3000.000,-. Oleh sebab itu nasabah berusaha bagaimana agar dapat melunasinya. Akan tetapi, banyak sekali pengeluaran yang terduga sehingga nasabah merasa keberatan.

Keempat, siti mengungkapkan bahwa pihak KSPPS menjelaskan mengenai simpanan haji mambrur dapat berubah menjadi pembiayaan haji apabila simpanan tersebut mencapai Rp. 6.200.000,-. Hal itu menyebabkan nasabah keberatan karena di dalam pembiayaan haji terdapat *ujroh* yang harus dikeluarkan apabila nasabah pembiayaan haji tidak dapat melunasi talangan haji dalam waktu satu tahun tersebut. Dan tentang perpindahan produk dari simpanan haji ke pembiayaan haji juga tidak disebutkan pada saat akad terjadi.<sup>61</sup>

#### 4. Ketentuan Simpanan Haji Mabrur

Ketentuan simpanan haji mabrur diantaranya sebagai berikut:

- 1). Simpanan menggunakan akad *wadī'ah yad damanah*. Pihak KSPPS berhak menggunakan dana nasabah secara professional dan

<sup>60</sup> Bagus,, *Wawancara*, Lamongan, 2 Januari 2019.

<sup>61</sup>Siti, *Wawancara*, Lamongan, 2 Januari 2019.

InsyaAllah akan mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan managemen dari pihak KSPPS.

- 2). Penarikan yang diwakilkan harus disertai dengan surat kuasa.
- 3). Simpanan haji mabrur tidak dapat ditarik sewaktu waktu kecuali untuk pendaftaran haji.
- 4). Jika terdapat selisih saldo maka yang digunakan adalah yang tercatat di BMT dengan disertai bukti-bukti yang ada.
- 5). Setoran awal minimal Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya terserah pada nasabah.<sup>62</sup>

## 5. Syarat Pendaftaran Haji

Berikut di bawah ini persyaratan pendaftaran ibadah haji diantaranya sebagai berikut:<sup>63</sup>

Untuk area Lamongan:

- 1). KTP : 10 lembar
- 2). KK : 4 lembar
- 3). Surat Nikah : 4 lembar
- 4). Cek Kesehatan

**NB: Foto sendiri dan membawa CD copynya.**

Ukuran  $4 \times 6 = 10$  lembar dan  $3 \times 4 = 15$  lembar

(Kelihatan muka 80% baik berjilbab/berkopyah dan tidak boleh memakai kaca mata).

<sup>62</sup> Imam Baihaqi, *Wawancara*, Lamongan, 7 Februari 2019.

<sup>63</sup> Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur





**ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR IV TAHUN 2000 TERHADAP  
SIMPANAN HAJI MABRUR DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA  
KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG BABAT LAMONGAN**

Menurut Wahbah Zuhaily, kata *wadī'ah* berasal dari *wada'a* yang memiliki arti meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara.<sup>65</sup> Dalam hal ini, simpanan haji mabrur menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Di mana pihak KSPPS dapat memanfaatkan dan mengelolah simpanan milik nasabah dan nasabah berhak mendapatkan bonus dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan simpanan tersebut. Akan tetapi, bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal.

1). Ulama' madzab Hanafi mendefinisikan dengan “mengikut sertakan orang lain di dalam memelihara harta, baik dengan ucapan jelas, melalui isyarat.” Pihak KSPPS diharuskan untuk dapat memelihara harta dengan baik kemudian pengucapan pada saat akad harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak nasabah.

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Beirut: Dar al-fikr, 1984 ), 556.

Kemudian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* memiliki tiga diantaranya sebagai berikut:

- Barang yang dititipkan adalah barang atau benda yang menurut syarat. Dalam hal ini pihak nasabah menitipkan simpanan haji agar dapat mewujudkan keinginan melaksanakan ibadah haji sebagai wujud dari rasa syukur Allah Swt dan ingin lebih mendekatkan diri kepadaNya.
- Orang yang menitipkan dan menerima titipan adalah baligh, berakal, serta syarat-syarat yang lainnya. Dalam sudah memenuhi syarat-syarat di mana nasabah sudah memiliki akal yang sehat dan tidak gila.

Kemudian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* memiliki tiga diantaranya sebagai berikut:

- Barang yang dititipkan adalah barang atau benda yang menurut syarat. Dalam hal ini pihak nasabah menitipkan simpanan haji agar dapat mewujudkan keinginan melaksanakan ibadah haji sebagai wujud dari rasa syukur Allah Swt dan ingin lebih mendekatkan diri kepadaNya.
- Orang yang menitipkan dan menerima titipan adalah baligh, berakal, serta syarat-syarat yang lainnya. Dalam sudah memenuhi syarat-syarat di mana nasabah sudah memiliki akal yang sehat dan tidak gila.

- Kemudian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* memiliki tiga diantaranya sebagai berikut:
- Barang yang dititipkan adalah barang atau benda yang menurut syarat. Dalam hal ini pihak nasabah menitipkan simpanan haji agar dapat mewujudkan keinginan melaksanakan ibadah haji sebagai wujud dari rasa syukur Allah Swt dan ingin lebih mendekatkan diri kepadaNya.
  - Orang yang menitipkan dan menerima titipan adalah baligh, berakal, serta syarat-syarat yang lainnya. Dalam sudah memenuhi syarat-syarat di mana nasabah sudah memiliki akal yang sehat dan tidak gila.

<sup>67 67</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...* 206

Ulama fiqh sepakat bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat untuk kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Apabila seseorang yang ditipti barang oleh orang lain dan akad telah sesuai dengan rukun dan syarat *wadī'ah*, maka pihak yang ditipti bertanggung jawab untuk memelihara barang tersebut. Akan tetapi apakah barang titipan bersifat amanah atau *ḍamanah* (ganti rugi). Ulama fiqh sepakat bahwa status *wadī'ah* bersifat *amanah* bukan *ḍamanah*. Sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan berlangsung tidak menjadi tanggung jawab orang yang ditipti.

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapan yang disertai dengan sumpah.<sup>69</sup>

Apabila simpanan haji mabrur hilang maka segala kerugian ditanggung oleh pihak KSPPS. Karena simpanan haji mabrur bersifat *ḍamanah* bukan *amanah*.

<sup>69</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah...* 273.

Dan apabila pihak KSPPS mengakui bahwa barang titipan rusak karena unsur tidak sengaja maka, ucapan yang harus dipercaya adalah ucapan yang didasari dengan sumpah.

Kemudian segala macam transaksi dapat dilakukan apabila tidak ada dalil yang menghamkannya sebagaimana, kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, semua akad itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>70</sup>

Dalam hal ini praktik simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Babat Lamongan tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor IV Tahun 2000 tentang Tabungan. Karena pada awalnya simpanan haji mabrur bersifat simpanan. Akan tetapi, pada pertengahan berubah menjadi pembiayaan haji apabila simpanan mencapai Rp. 6.200.000,-. Dan pada saat akad simpanan haji tidak di jelaskan tentang ketentuan dua akad dalam satu transaksi tersebut. Sehingga hal itu memberatkan bagi pihak nasabah simpanan haji mabrur.

*Wadi'ah* terbagi menjadi dua, yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*, selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi keduanya di Perbankan Syariah, diantaranya sebagai berikut:

<sup>70</sup> Nashr Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* ( Jakarta: Amzah, 2009), 43.



nasabah. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya akad ini ditekankan pada titipan.<sup>72</sup>

Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dapat dibenarkan secara syarah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadfi'ah* dan *mudarabah*.<sup>73</sup>

Simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring menggunakan akad *wadī'ah yad dāmanah*, sehingga pihak KSPPS dapat mengelola dan memanfaatkan dana simpanan haji mabrur. Kemudian pihak nasabah berhak mendapatkan bonus dari pihak KSPPS atas hasil pengelolaan dan pemanfaatan dana simpanan haji mabrur. Akan tetapi, bonus tidak dapat diperjanjikan di awal.

### 3. Giro *wadī'ah*

Giro *wadi'ah* adalah titipan yang bersifat murni dan dapat diambil saat pemilik menghendakinya. Dalam *wadi'ah yad damanah*, pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Bahwa *wadi'ah yad damanah*, mempunyai implikasi hukum yang dapat disamakan dengan *qard*, yakni nasabah sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak bisa saling menjanjikan untuk memberi imbalan atas pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

<sup>72</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 149.

<sup>73</sup> Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam...* 140.

#### 4. Tabungan *wadī'ah*

Di samping giro, produk perbankan syariah yang termasuk penghimpunan dana (*funding*) terdapat tabungan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau sebagainya.<sup>75</sup>

Penarikan simpanan haji mabrur sesuai dengan kesepakatan antara pihak KSPPS dan nasabah. Dari awal sudah dijelaskan bahwa simpanan haji mabrur hanya dapat ditarik untuk pendaftaran haji dan tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet, giro, dan sebagainya.

<sup>75</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 339.



Pada praktiknya, saat simpanan haji sebesar Rp. 6.200.000,- nasabah dapat melanjutkan dengan pembiayaan haji yang menggunakan akad *rāhn*, sehingga dapat disimpulkan bahwa, simpanan haji mabrur di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Babat Lamongan tidak sejalan aplikasi perbankan syariah dalam hal ini adalah *wadī'ah*.

Adanya dua akad dalam satu transaksi tersebut juga tidak dijelaskan pada saat akad terjadi. Sehingga membuat nasabah keberatan karena di dalam pembiayaan haji nasabah harus melunasinya dalam jangka waktu satu tahun. Apabila nasabah tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu tersebut maka, nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak KSPPS. Sehingga nasabah merasa sangat terbebani karena kita tidak tahu kedepannya apakah rezeki selalu lancar atau tidak.

Seharusnya, pihak KSPPS menjelaskannya di awal akad agar nasabah tidak merasa keberatan dengan perubahan simpanan haji mabrur menjadi pembiayaan haji tersebut. Karena dalam praktiknya simpanan haji mabrur harus mencapai Rp. 25.000.000,- sedangkan dalam pembiayaan haji nasabah harus melunasi dalam waktu satu tahun dengan angsuran pertama sebesar Rp. 6.200.000,-. Apabila nasabah tidak dapat melunasinya, maka nasabah harus membayar *ujroh* sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak KSPPS. Dan mengenai pembiayaan dapat diangsur sampai dengan 5 tahun.



Dalam Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000 tentang Tabungan.  
tabungan ada dua jenis, yaitu:

- Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah*:

- Pada awalnya simpanan haji mabrur bersifat simpanan karena menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Akan tetapi ketika simpanan sebesar Rp. 6.200.000,- nasabah sudah dapat melaksanakan pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji. Di mana dalam hal ini, pembiayaan haji menggunakan akad *rāhn*. Sedangkan dalam simpanan hanya ada akad *muḍarabah* dan *wadī'ah* saja. Sehingga, praktik simpanan haji mabrur tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor IV Tahun 2000.

<sup>76</sup> Ahmad Ifham, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 137.

Pada saat akad simpanan haji mabrur hanya dijelaskan bahwa, nasabah harus memiliki simpanan sebesar Rp. 25.000.000,- agar mendapatkan porsi haji. Nasabah tidak boleh mengambil uang simpanan haji mabrur kecuali untuk daftar haji bukan untuk kepentingan lain sekalipun kepentingan tersebut sangat mendesak dan menyangkut nyawa seseorang. Jadi, nasabah harus mencari dana lain bukan dengan mengambil uang simpanan haji mabrur.

Nasabah mendapatkan bonus pada saat menjadi nasabah simpanan haji mabrur karena menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Akan tetapi, pada saat nasabah beralih menjadi nasabah pembiayaan haji maka nasabah tidak mendapatkan bonus dari pihak KSPPS karena pembiayaan haji menggunakan akad *rāhn*.

Seharusnya, pihak KSPPS tidak menggabungkan akad simpanan haji mabrur dengan pembiayaan haji. Dan penggabungan dua akad tersebut juga tidak dijelaskan pada saat akad simpanan haji mabrur. Sehingga memberatkan bagi nasabah simpanan haji mabrur.





- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mirfaqotul Asdiqo'. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Batang" Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Mutiari. "Mekanisme Produk Simpanan Haji dan Umrah di KSPPS BMT BUS Cabang Welahan" Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariyyah Modern*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.
- Nawawi, Imam. *Riyadhu Ash Sholihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin*. Kairo: Darut Tufiq li At-Turats, 1415.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid 12. Riyad: Dar al-Muayyad, 1997.
- Sahroni, Oni, Karim, Adiwarmen A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelian Hukum*, Cet.III. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2005.
- Syamsuddin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

